



Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten

Ismiyati^{1*}, dan Anggita Nurcahyani ²

¹ *Yayasan Abulyatama, Indonesia*

² *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

E-mail: Ismiyatianninda@gmail.com

ABSTRACT

The development of the Human Development Index (IPM) in Banten has increased every year. However, the progress is quite slow. The purpose of this study was to analyze the effect of government spending on education, poverty, and GRDP on the human development index of Banten. Sources of data in this study came from BPS Banten Province and the regional education balance Ministry of Education and Culture (KEMENDIKBUD). The sample in this study is data on government spending on education, poverty, regional gross domestic product and human development index in 4 districts and 4 cities in Banten 2015-2019. In this study used a saturated sample. The results show that partially the education budget variable has no significant effect on the Human Development Index, which means that an increase in the education budget each year does not significantly affect IPM. Poverty has a negative and significant effect on IPM in Banten, so decreasing poverty levels will increase IPM in Banten, and GRDP has an insignificant positive effect on IPM, which means that an increase in GRDP every year does not significantly affect IPM in Banten. Simultaneously, the variables of government expenditure on education, poverty, and GRDP have a significant effect on IPM in Banten.

Keywords: *Human Development Index (IPM), Government Spending on Education, Poverty, and GRDP*

Pendahuluan

Pembangunan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara.

Pembangunan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara (Ibrahim, 2016).

Meningkatnya angka kesejahteraan merupakan tujuan bagi setiap pemerintah daerah. Umat Islam diajarkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah, baik secara ekonomi, agama, ilmu, maupun pertahanan. Seperti yang dijelaskan pada Qs. an-Nisa ayat 9 yang artinya:

“Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. Pada tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan “Human Development Index (HDI)” atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesehatan, Kualitas pendidikan dan Akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan tiga komponen indikator IPM.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Banten dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perkembangan ini positif bagi pengembangan SDM Banten, namun dibandingkan provinsi lain di Jawa, kinerja IPM Banten masih cukup rendah, Meskipun menempati posisi IPM tertinggi ketiga di Jawa, perkembangannya sangat lambat seperti yang Anda lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1
IPM Provinsi Banten Tahun 2015-2019

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Banten	70.27	70.96	71.42	71.95	72.44

Pemerintah terus meningkatkan jumlah investasinya pada sektor pendidikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pengeluaran yang semakin meningkat tersebut masih kecil bila dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa sendiri. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Banten juga merupakan Provinsi yang menempatkan pendidikan sebagai aspek penting dalam pembangunan. Seberapa besar komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan antara lain tercermin dari anggaran pendidikan yang disediakan dalam APBD.

Rumah tangga masyarakat memegang peranan yang penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan yang dihasilkan. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan hal yang kompleks yang bermula dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan.

Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini pada akhirnya akan berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah.

Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari proses produksi barang dan jasa yang ada di negara tersebut. Terjadinya kenaikan atau penurunan PDRB mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari adanya perubahan PDRB dari satu periode ke periode berikutnya, yang merupakan salah satu petunjuk nyata pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan keberhasilan implementasi kebijakan.

Referensi utama dalam tulisan ini adalah 2 jurnal, referensi jurnal pertama berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jurnal tersebut variabel independen berjumlah dua, yaitu produk domestik regional bruto dan belanja pemerintah fungsi pendidikan dan variabel dependen berjumlah satu yaitu indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini akan ditambahkan satu dalam variabel independen yaitu kemiskinan, objek yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan objek dalam penelitian ini adalah provinsi Banten, periode dalam jurnal ini adalah tahun 2014-2018, sedangkan dalam penelitian ini periode yang digunakan pada tahun 2015- 2019.

Referensi jurnal kedua berjudul Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur, dalam jurnal tersebut variabel independen berjumlah tiga, yaitu kemiskinan, produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah dan variabel dependen berjumlah satu yaitu indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini tidak ada variabel PAD melainkan belanja pemerintah fungsi pendidikan, periode dalam jurnal ini adalah tahun 2010-2014, sedangkan dalam penelitian ini periode yang digunakan pada tahun 2015-2019.

Tinjauan Pustaka

Pengeluaran pemerintah (Government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan seberapa besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah disetiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output yang didapat, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia melalui penyediaan pelayanan dasar akan sangat memengaruhi kualitas human capital di masa yang akan datang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi warganya dengan menyediakan pelayanan dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Pelayanan dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan publik seperti layanan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan akan mempunyai pengaruh pada pembangunan manusia.(Mongan,

2019).

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan merupakan suatu hal yang mendasar dan sangat vital dalam pembangunan manusia, pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai suatu peradaban manusia yang lebih maju dengan meningkatkan kapabilitas manusia tersebut. Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diukur dari faktor kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Josep, 2018).

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk kepada kategori miskin. Namun menurut World Bank setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu : (1) rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan; (2) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat; dan (3) Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya (Josep, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Manggala, 2019).

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia di perkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan di publikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) (BPS, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan manusia adalah alat atau metode yang dilakukan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup serta mengetahui dan mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan hidup masyarakat. Kesejahteraan dalam Islam bukan hanya duniawi saja tetapi juga akhirat. Sehingga manusia harus ayat 9 untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah SWT. Seperti janji Allah SWT bahwa akan memberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal/ kerja maupun usaha yang dilakukan manusia. Sehingga dalam hal ini pemerintah sebagai ulul amri memiliki tanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat (Ningrum et al., 2020).

Metode

Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS Banten. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1), Kemiskinan (X2), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun untuk objek penelitian dilakukan di 4 Kabupaten dan 4 Kota di Banten yaitu: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang dengan tahun pengamatan selama 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel, yaitu penggabungan *cross section* dan *time series*, yang kemudian diolah menggunakan Eviews 9.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Statistik Deskriptif

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) sebagai variabel X1 memiliki nilai minimum sebesar Rp. 4.17E+08 Milyar dan nilai maksimum sebesar Rp. 2.32E+09 Milyar. Adapun nilai rata-rata sebesar Rp. 1.16E+09 Milyar dan standar deviasi sebesar Rp. 4.89E+08 Milyar.

Kemiskinan sebagai variabel X2 memiliki nilai minimum sebesar -1.516150% dan maksimum sebesar 78 1.941892%. Lalu nilai rata-rata sebesar 2.50E-11% dan standar deviasi sebesar 1.000000%.

PDRB sebagai variabel X3 memiliki nilai minimum Rp. 2208098 Juta dan maksimum sebesar Rp. 44169193 Juta. Adapun mendapatkan nilai rata-rata sebesar Rp. 19941297 Juta dan standar deviasi sebesar Rp. 12468571 Juta.

IPM sebagai variabel Y memiliki nilai minimum 22.31118 % dan maksimum sebesar 29.98914 %. Memperoleh nilai rata-rata sebesar 25.69955% dan standar deviasi sebesar Rp. 12468571 Juta.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.129209 menunjukkan bahwa prob >5%. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Dari hasil uji yang dilakukan, tidak ada nilai korelasi yang tinggi. Nilai antar variabel bebas tidak melebihi 0,9. Maka dapat disimpulkan pada model tersebut tidak terdapat Multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW terletak antara (dU dan 4-dU) yakni $1,6505 \leq 2,31328 \leq 2,3495$, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, maka (terima dan tolak) yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

Uji Heterokedastisitas

Hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh variabel menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05. Hal ini berarti 88 bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (T)

Nilai t-hitung pada PPBP (X1) sebesar 1.104512 dengan probabilitas 0.2767 hasil tersebut menunjukkan probabilitas $> 0,05$. Berarti tidak terdapat pengaruh signifikan PPBP terhadap IPM.

Nilai t-hitung pada Kemiskinan (X2) sebesar -7.112644 dengan probabilitas 0.0000 hasil tersebut menunjukkan probabilitas $< 0,05$. Berarti terdapat pengaruh signifikan Kemiskinan terhadap IPM.

Nilai t-hitung pada PDRB (X3) sebesar 0.324249 dengan probabilitas 0.7476 hasil tersebut menunjukkan probabilitas $> 0,05$. Berarti tidak terdapat pengaruh signifikan PDRB terhadap IPM.

Uji Simultan (F)

Melalui uji simultan menghasilkan F hitung = 27.39310 dengan probabilitas 0.0000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan PPBP, Kemiskinan, dan PDRB terhadap IPM di Banten.

Uji Koefisien Determinasi

Diperoleh nilai sebesar 0,669993, hal ini berarti Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDRB mempengaruhi IPM hanya (66,9%) saja. Sisanya sebesar 34,1% dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain di luar variabel yang tidak dihitung pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Nilai 0.000000000721 mengindikasikan bahwa PPBP memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM Provinsi Banten. Artinya, jika Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan meningkat sebesar 1 poin maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.000000000721 meskipun tidak signifikan.

Sesuai dengan penelitian Pake et al (2018) yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara. Hasilnya diperoleh PPBP memiliki tanda positif namun kurang berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan diseluruh wilayah untuk berbagai jenjang pendidikan yang lebih baik lagi. Tentunya perlu melakukan implementasi kebijakan yaitu terus meningkatkan anggaran pendidikan untuk meningkatkan IPM.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Diperoleh nilai Kemiskinan sebesar -1.800426. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM Provinsi Banten. Hal itu disebabkan apabila terjadi peningkatan pada kemiskinan sebesar 1 poin maka akan menurunkan IPM sebesar 1.800426.

Hasil tersebut sama dengan kajian yang dilakukan Faradiba et al (2018). Hasil penelitian diperoleh Kemiskinan berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Nilai PDRB sebesar 0.00000000923 mengindikasikan bahwa PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM Provinsi Banten. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pada PDRB sebesar 1 poin maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.00000000923 meskipun tidak signifikan.

Hal ini terjadi karena PDRB menghitung seluruh nilai tambah yang dihasilkan di suatu wilayah tanpa memperhitungkan apakah yang menghasilkan nilai tambah itu adalah penduduk atau bukan. Serta PDRB perkapita membagi rata nilai PDRB dengan jumlah penduduk sehingga terdapat ketimpangan pendapatan di antara golongan penduduk.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDRB secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan perhitungan regresi panel dapat dilihat hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai F hitung = 27.39310 dengan probabilitas 0.0000. Sehingga bersama-sama terdapat pengaruh signifikan Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, kemiskinan, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan berikut ini:

- 1) Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.
- 2) Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi peningkatan Kemiskinan maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.
- 3) PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Artinya tinggi rendahnya PDRB tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- 4) Variabel Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, kemiskinan, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Referensi

- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>,
- Faradiba, A. O., Fathoerrazi, M., & S, R. P. (2018). Pengaruh Kemiskinan, PDRB,, Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. *Journal Ekuilibrium*, 1(1), 7–13.
- Ibrahim, Z. (2016). *Pengantar Ekonomi Makro*. Koperasi Syariah Baraka.
- Josep. (2018). *Konsep dan Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Indocamp.
- Manggala, G. D. (2019). Pengaruh Dana Desa (Dd) Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)*, 1(1).
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 163–176.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212–222.
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M. V., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi*, 18(04), 13–22.